

STRATEGI PENANGANAN KEMISKINAN NELAYAN TRADISIONAL

POOR TRADITIONAL FISHERMEN HANDLING STRATEGY

Andayani Listyawati

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial RI
Jl. Kesejahteraan Sosial No 1 Sonosewu Yogyakarta Indonesia HP. 081328544229

Email: andayani307@yahoo.com

Naskah diterima 3 Februari 2016, direvisi 3 Maret 2016, diterima 15 Maret 2016

ABSTRACT

The research is a description to reveal living condition of traditional fishermen at Aluh-aluh Subdistrict, Banjar Regency, South Borneo Province. Those fishermen condition are not much different from traditional fishermen in general, closed to poverty and several limited aspek such as equipment and limited exploring ability, education and income are low. That contradicts with sea condition as wealth resources for all level of communities, including fishermen. Ironically, there have been many fishermen with limited lives and poor. Through the research, it meant to know poor traditional fishermen strategic handling so that their lives lifted from poverty. Data resources were 30 government personels. Data gathering technics were interview, observation, and documentary analysis, to reveal the problem of their poverty. It can be concluded that the limit mentioned above are poor catching equipments, short exploring ability, low education, and small income. It recommended that to increase their dignity and honour, it can be done through empowerment activity with respecting to local culture.

Keywords: Poverty, Traditional Fishermen, Handling Strategy

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan deskripsi untuk mengungkap kondisi kehidupan nelayan tradisional di wilayah Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi nelayan tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi nelayan tradisional pada umumnya yang lekat dengan kemiskinan dan keterbatasan berbagai aspek seperti peralatan dan jarak jelajah terbatas, pendidikan dan tingkat pendapatan rendah. Kondisi ini bertolak belakang karena laut pada hakikatnya merupakan sumber kekayaan untuk kemakmuran seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali bagi nelayan. Ironisnya masih banyak nelayan yang kehidupannya terbatas dan miskin, oleh karena itu melalui penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penanganan kemiskinan nelayan tradisional agar kehidupannya terentaskan dari kemiskinan. Sumber data nelayan miskin sebanyak 30 orang dan aparat pemerintah. Teknik pengumpulan data wawancara, pengamatan, dan telaah dokumen dapat diungkap permasalahan yang menyebabkan nelayan menjadi miskin. Disimpulkan bahwa keterbatasan dimaksud seperti peralatan tangkap dan jarak jelajah terbatas, pendidikan rendah, dan penghasilan terbatas. Rekomendasi yang diajukan adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat nelayan tradisional melalui kegiatan pemberdayaan dengan memperhatikan budaya setempat.

Kata Kunci: Kemiskinan, Nelayan Tradisional, Strategi Penanganan

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara maritim yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi mata pencaharian penduduk yang berkecimpung ke dalam sektor perikanan dan kelautan. Demikian juga kehidupan nelayan yang menggantungkan hidupnya pada sektor kelautan. Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang matapencahariannya sebagian besar bersumber dari aktivitas menangkap ikan dan mengumpulkan hasil laut. Umumnya mereka hidup di kawasan pesisir pantai dan sangat dipengaruhi oleh kondisi alam seperti angin, gelombang dan arus laut, akibatnya aktivitas penangkapan ikan tidak berlangsung sepanjang tahun.

Pekerjaan nelayan sejatinya penuh dengan resiko karena kendala yang dihadapi tidak hanya menyangkut lingkungan alam saja tetapi juga lingkungan sosial. Penelitian Acheson (1981) menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi nelayan tidak hanya menyangkut lingkungan alam saja, seperti laut yang penuh resiko bahaya dan ketidakpastian mengenai ombak besar, hujan deras disertai angin kencang, dan badai yang tak menentu datangnya serta biotik laut lain yang beragam, tetapi juga kendala menyangkut lingkungan sosial. Kendala yang dihadapi nelayan menyangkut lingkungan sosial, yaitu kadang terjadi persaingan, baik secara individu maupun kelompok dalam memperebutkan tempat penangkapan ikan dan sumber biotik lain, padahal tempat tersebut merupakan kekayaan milik bersama dan bersifat terbuka. Akibat dari persaingan, dapat menimbulkan rusaknya ekologi di daerah perikanan tertentu, karena di saat memperoleh kesempatan, mereka menangkap ikan secara besar-besaran tetapi tidak memperhatikan keseimbangan ekologis. Kendala lain yang dihadapi nelayan adalah terbatasnya pengetahuan penguasaan teknologi tepat guna seperti masalah pengawetan ikan dan menghadapi kesulitan eksploitasi baik dari pedagang, tengkulak, pemilik modal, dan pemilik kapal.

Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam penanganan nelayan tradisional dan strategi pengolahan sumber

daya perikanan serta pesisir merupakan salah satu agenda dalam kebijakan pembangunan nasional saat ini, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan pelayanan pada masyarakat nelayan yang masih tertinggal. Di lain sisi kondisi empirik memperlihatkan kehidupan nelayan terutama yang bukan pemilik modal kondisinya kurang sejahtera, miskin, tidak berdaya, dan tidak pasti perekonomiannya. Hal ini dipengaruhi karena ketidakpastian pendapatan keluarga yang sangat tergantung dari pekerjaan melaut. Berkait dengan penelitian tentang kemiskinan pada nelayan, seperti yang dikemukakan Mubyarto (1984) menguraikan bahwa nelayan kecil atau tradisional dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain di sektor pertanian. Kondisi ini dapat diasumsikan oleh tingginya ketergantungan nelayan terhadap kondisi alam, artinya saat menjalankan kegiatan atau usaha sangat tergantung kepada kondisi alam. Apabila cuaca sedang buruk maka berdampak terhadap aktivitas melaut menjadi berhenti sehingga tidak mendapat penghasilan. Pada hakikatnya nelayan tradisional (*peasant-fisher*) merupakan nelayan yang memanfaatkan sumber daya perikanan dengan peralatan tangkap tradisional, modal usaha yang kecil, dan organisasi penangkapan yang sederhana. Ciri-ciri usaha nelayan tradisional adalah 1) teknologi penangkapan yang digunakan bersifat sederhana dengan ukuran perahu yang kecil, daya jelajah terbatas, daya muat perahu sedikit, daya jangkauan alat tangkap terbatas, dan perahu dilajukan dengan layar, dayung, atau mesin berPK kecil; 2) Besaran modal usaha terbatas; 3) Jumlah anggota organisasi penangkapan kecil antara 2-3 orang dengan pembagian peran bersifat kolekti (non spesifik) dan umumnya berbasis kerabat, tetangga dekat, dan atau teman dekat; 4) Orientasi ekonominya terutama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari (Kusnadi, 2008).

Nelayan tradisional identik dengan ketergantungan terhadap kondisi alam, hasil tangkapan yang diperoleh dan ketergantungan pada permodalan serta jaringan sosial pemasaran. Fenomena yang terjadi, nelayan

tradisional berada pada kondisi miskin bahkan saat musim paceklik (sepi ikan) tidak jarang para nelayan harus berhutang kepada saudara atau tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada saat musim paceklik tradisi menjual barang-barang rumah tangga kadang dilakukan agar dapat memenuhi kehidupan sehari-hari, selain itu tingkat pendidikan nelayan tradisional ditandai relatif rendah. Kenyataan ini cukup ironis, mengingat kemiskinan itu justru terjadi ditengah-tengah berlimpahnya sumber daya laut yang sesungguhnya dapat menyejahterakan mereka (Fatik Wijaya, 2003).

Sebagaimana diketahui jumlah nelayan tradisional di Indonesia turun dari 1,6 juta menjadi 864 rumah tangga nelayan tradisional (BPS, tahun 2013). Nelayan tersebut tersebar di wilayah pesisir Indonesia. Sebagai nelayan, aktivitas ekonomi rumah tangganya sangat terikat dengan pekerjaan menangkap ikan di laut. Pola pekerjaannya membatasi aktivitas ke sektor pekerjaan lain, akibatnya mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Dengan demikian nelayan rentan terperangkap kedalam kemiskinan, karena tidak hanya berkait dengan masalah fluktuasi musim ikan, dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan modal, tetapi juga akses jaringan, akses perdagangan ikan dengan menentukan harga jual yang dilakukan tengkulak secara sewenang-wenang, dampak negatif modernisasi perikanan yang mendorong terjadinya pengurusan sumber daya laut secara berlebihan (Kusnadi, 2008). Sementara itu, walaupun pada hakikatnya nelayan mempunyai etos kerja tinggi (Kusnadi, 2009).

Kemiskinyangdihadapinelayantersebut seyogyanya segera diatasi agar kehidupan sosial ekonomi dapat lebih baik. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan. Sejak tahun 1974, pemerintah telah mengeluarkan program bantuan kredit kepada nelayan, seperti Kredit Investasi kecil (KIK), Kredit Modal kerja permanen (KMKP), dan kredit Bimas. Program tersebut ditujukan untuk pengusaha ekonomi lemah tidak terkecuali nelayan. KIK merupakan

kredit jangka menengah/ panjang digunakan untuk rehabilitasi ataupun modernisasi seperti peralatan. KMKP diperuntukkan pengusaha kecil ataupun pribumi dengan persyaratan khusus sebagai modal agar usahanya lancar sedangkan Kredit Bimas diberikan kepada pengusaha kecil dan pedesaan untuk membantu dalam meningkatkan produksinya. Sekalipun demikian paket bantuan kredit tersebut atau program bantuan lain, seperti program kredit bergulir belum mampu mengatasi kesulitan sosial ekonomi nelayan. Tidak sedikit program bantuan kredit dan kredit bergulir mengalami kemacetan sehingga pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan program bantuan kredit untuk masyarakat nelayan. Hambatan pengembalian kredit karena tingkat penghasilan nelayan sangat kecil (Kusnadi, 2008).

Sumber daya laut yang sesungguhnya dapat memberikan kesejahteraan bagi nelayan, tetapi kenyataannya sungguh ironis karena komunitas nelayan tradisional masih hidup miskin. Program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan seperti yang dilaksanakan sejak tahun 1980 an terutama ditujukan di daerah padat nelayan yaitu program motorisasi. Program ini berkait dengan penghapusan pukat harimau yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas penangkapan ikan, tetapi program tersebut tidak tepat sasaran karena relatif bertentangan dengan nelayan kecil. Sejalan dengan hal itu diawali tahun 2016 atau setelah refomasi KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) membuat program laut bebas polusi, artinya membuat program gerakan laut bebas dari kotoran sampah.

Berdasar ilustrasi di atas diketahui bahwa kondisi kehidupan nelayan tradisional terbatas baik potensi dan sumber kesejahteraan sosial, maka perlu dilaksanakan penelitian mengenai strategi penanganan kemiskinan nelayan agar kehidupannya menjadi lebih sejahtera. Seiring dengan perihal tersebut maka rumusan masalahnya adalah bagaimana strategi penanganan kemiskinan nelayan tradisional. Tujuannya diketahui strategi penanganan kemiskinan nelayan tradisional, selanjutnya manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu

pertama, sebagai masukan kepada Direktorat Penanganan Fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara Kementerian Sosial RI dan instansi terkait dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan tradisional. Kedua, menambah referensi mengenai kehidupan nelayan tradisional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian Strategi Penanganan Kemiskinan Nelayan Tradisional ini menggunakan pendekatan secara kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap kondisi kemiskinan yang melekat pada komunitas nelayan tradisional dan strategi penanganannya ini mengikuti logika secara induktif (Husaini Usman, 2008:101). Lokasi dilaksanakannya penelitian di Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan berdasar pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan salah satu daerah yang mempunyai sejumlah nelayan. Sebagaimana diketahui bahwa nelayan miskin di Kalimantan Selatan mencapai 70% dari total jumlah nelayan seluruhnya 49.142 KK. Dari 19 desa di kecamatan tersebut dengan kriteria tertentu ditentukan di Desa Aluh-aluh Besar, sedangkan informannya merupakan nelayan miskin (buruh nelayan) sebanyak 30 orang.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Wawancara dilakukan menggunakan panduan untuk menggali informasi dari informan sebanyak-banyaknya sesuai dengan tema penelitian. Informan yang dimaksud terdiri dari nelayan tradisional (kepala keluarga) dan aparat pemerintah setempat. Selain wawancara, observasi juga dilakukan dengan menggunakan pedoman observasi dan telaah dokumen yaitu mengkaji berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kenelayanan dari berbagai sumber seperti buku, laporan ataupun website. Penelitian ini dilaksanakan pada periode akhir tahun 2015.

Proses analisis data kualitatif dimulai dari pengumpulan data, baik terhadap data primer maupun sekunder. Pengumpulan data

primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan kecamatan dan informasi terkait yang memperkuat data primer seperti dari Dinas Perikanan dan Kelautan setempat. Selanjutnya telaah dokumen digunakan sebagai penunjang untuk pengayaan yang diperoleh dari buku, brosur, surat kabar ataupun website. Analisisnya mengikuti model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1984) yang dikenal dengan model interaksi yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikelompokkan kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk narasi yang bermakna.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi, Kecamatan Aluh-aluh merupakan daerah nelayan karena wilayah tersebut penduduknya mayoritas bermatapencaharian sebagai nelayan. Aluh-Aluh termasuk wilayah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang beribukota di Martapura. Mengenai batas wilayahnya, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tapin, sebelah selatan Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin. Luas wilayah Banjar sebesar 4.668,50 km² terdiri atas 19 kecamatan dan 290 desa/kelurahan. Luas wilayah Banjar tersebut dihuni sebanyak 536.328 orang terdiri laki-laki 272.303 orang dan perempuan 264.025 orang (Kabupaten Banjar dalam Angka, 2014).

Khususnya Kecamatan Aluh-Aluh, secara geografis tata letaknya disebelah utara berbatasan dengan Kota Banjarmasin, sebelah timur dengan Kecamatan Kertak Hanyar, Gambut dan Kecamatan Baruntung Baru, selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala. Luas Kecamatan ini sebesar 82,48 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 28.507 jiwa yang tersebar dan menempati di 19 desa (Kabupaten Banjar dalam Angka, 2014). Kecamatan Aluh-Aluh yang tata letaknya merupakan kawasan

pesisir sebenarnya mempunyai potensi perikanan yang dapat dikembangkan namun disatu sisi mempunyai permasalahan sosial tentang kemiskinan mayoritas cukup banyak yaitu sejumlah 275 KK disusul dengan masalah korban bencana alam dan wanita rawan sosial ekonomi (Monografi Kecamatan Aluh-aluh, 2014). Sebagai kawasan mayoritas berpenduduk miskin dan bermatapencaharian sebagai nelayan, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa sektor kemaritiman terutama penangkapan ikan menjadi pilihan utama untuk mendapatkan penghasilan dibanding dengan jenis usaha lain seperti pertanian. Kondisi kehidupan para komunitas nelayan di Aluh-aluh ini dikatakan sebagai nelayan tradisional.

Kabupaten Banjar merupakan kawasan yang memiliki potensi kelautan dan perikanan seperti di Kecamatan Aluh-Aluh yang berbatasan dengan perairan laut. Kecamatan tersebut mempunyai 19 desa, salah satunya Desa Aluh-Aluh Besar yang mempunyai luas wilayah 6,50 km² merupakan wilayah relatif cukup luas dibandingkan desa lain yang mayoritas penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Kecamatan Aluh-Aluh memang pernah dijadikan Pusat Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PPDPT) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kawasan pesisir agar semakin sejahtera. Beberapa desa yang tersentuh program tersebut yaitu Desa Labat Muara, Desa Bakambat, dan Desa Tanipah, sedangkan Desa Aluh-Aluh sampai saat penelitian dilaksanakan belum pernah tersentuh program apapun dari pemerintah.

Karakteristik Nelayan Tradisional, nelayan tradisional di Kecamatan Aluh-aluh yang menjadi lokasi penelitian berdasar kriteria yang telah ditentukan selanjutnya ditetapkan di Desa Aluh-aluh Besar. Informannya adalah nelayan miskin (buruh nelayan) yang menjadi kepala keluarga dan bertempat tinggal di Desa Aluh-Aluh Besar. Berdasar identifikasi mengenai usia nelayan dikatakan sebagai usia muda, hal ini dapat disimak pada tabel berikut.

Tabel 1
Usia Informan

N0	Kategori Usia/tahun	F	Persentase
1	20 - 30	8	26,67
2	31 - 40	13	43,33
3	41 - 50	6	20
4	51 keatas	3	10
Jumlah		30	100

Sumber: Data primer 2015

Hasil pendataan yang kemudian direkap memperlihatkan bahwa semua informan merupakan nelayan berstatus kepala keluarga, berdasar usia tergolong usia muda/ produktif/ angkatan kerja, yaitu dalam rentang usia 20 hingga 51 tahun ke atas. Adapun mayoritas menurut usia adalah 31 – 40 tahun sejumlah 13 orang (43,33%), usia 20 -30 tahun (26,67%) dan usia 41 -50 tahun (20%) jumlahnya relatif sebanding. Informan berusia 51 tahun ke atas jumlahnya sedikit ditunjukkan tiga orang (10%). Kondisi ini memperlihatkan, bahwa semakin banyaknya usia maka pekerjaan yang berkait dengan kenelayanan dirasa semakin berat, karena sebagai nelayan dituntut fisik yang kuat. Runutan wawancara diperoleh informasi bahwa mereka menekuni pekerjaan kenelayanan karena turun temurun, artinya meneruskan pekerjaan orang tua. Sejak kecil yang dilihat adalah pekerjaan yang berkait dengan kelautan, baik itu sebagai nelayan ataupun pekerjaan yang berhubungan dengan kapal seperti membuat /memperbaiki jaring, memperbaiki kapal ataupun menjual BBM (Bahan Bakar Minyak). Mengenai kepemilikan kapal, hasil wawancara juga menyatakan bahwa semua informan mengatakan kapal yang dijalankan milik juragan, tidak seorangpun yang menyatakan mempunyai kapal pribadi. Sehingga dikatakan bahwa nelayan yang dimaksud semuanya menjadi buruh.

Hasil pengamatan, memperlihatkan terdapat kaitan antara usia nelayan dengan raut wajahnya yang menunjukkan perbedaan menyolok. Hal ini terlihat bahwa wajahnya lebih tua dari usinya, sehingga ada perbedaan menyolok antara wajah dengan usia tidak sepadan. Asumsi menunjukkan bahwa

seseorang yang menyandang banyak beban akan terlihat dari raut wajah yang lebih tua dari usianya. Demikian juga nelayan di Aluh-Aluh diketahui usianya masih muda, namun setelah dirunut lebih lanjut melalui wawancara menunjukkan bahwa mereka tidak berkeinginan untuk meninggalkan pekerjaan kenelayan walaupun menghadapi banyak resiko. Keteguhan nelayan setempat disinyalir dipengaruhi budaya masyarakat setempat masih kuat. Berkait dengan hal tersebut untuk meningkatkan kapasitas kenelayan selayaknya nelayan memiliki kapasitas profesional yaitu mempunyai *knowledge* (pengetahuan), *skill* (keterampilan), dan etika. Pengetahuan dapat ditingkatkan apabila nelayan banyak membaca, belajar, diskusi, bertanya dan selalu mempunyai keingintahuan akan adanya hal-hal yang sifatnya baru. Skill didapat dengan melakukan latihan (seperti magang kepada nelayan yang lebih profesional) dan menerapkannya dalam menjalankan praktik profesi. Sedangkan etika profesi, lebih menuntut ketulusan dan kejujuran dari pelakunya (Hempri Suyatno, 2004).

Kondisi nelayan Aluh-aluh mayoritas merupakan nelayan tradisional karena bercirikan menggunakan peralatan terbatas yaitu menggunakan jaring/ payang dan pendidikan/ keterampilan relatif rendah, dan penghasilan juga rendah yaitu berkisaran Rp 500.000-Rp 800.000,-. Selain itu, ketergantungan nelayan dengan juragan. Ketergantungan ini terlihat semua kebutuhan untuk melaut dimodali juragan dan semua hasil melaut diserahkan juragan. Mengenai peralatan yang digunakan nelayan Aluh-Aluh, seperti kapal motor kecil dengan jarak tempuh kurang dari 30 mil, kapasitas muatan dua-tiga orang dengan jarak jelajah terbatas, peralatan sederhana berupa jaring perangkap ikan/ payang, modal terbatas ataupun modal dari *juragan* kapal. Selanjutnya dilihat dari aspek tingkat pendidikan yang ditempuh relatif rendah, karena mayoritas berpendidikan SD sejumlah 17 orang (56,67%), SMP sejumlah 10 orang (33,33%), dan hanya tiga orang (10%) yang menamatkan pendidikan SMA ke atas. Pendidikan yang dapat ditamatkan hingga jenjang SMA ke atas hanya pada nelayan yang

berusia masih muda, sedangkan nelayan yang tamat SD ataupun SMP umumnya berusia di atas 40 tahun. Keterbatasan pendidikan bagi nelayan disebabkan masalah ekonomi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendidikan, akses pelayanan meneruskan pendidikan tidak ada, dan budaya setempat yang tidak memberi motivasi untuk meneruskan pendidikan. Sebagaimana diketahui, bahwa lembaga pendidikan yang ada di kecamatan tersebut hingga sampai tingkat sekolah menengah. Tingkat SD sebanyak 28 buah, SMP sebanyak sembilan buah, dan SMA sebanyak dua buah, hal ini menandakan bahwa untuk melanjutkan pendidikan di atasnya perlu ada tekad dan kemauan karena harus keluar dari kecamatan. Berdasar pengakuan salah seorang nelayan (Mrd) mengungkapkan: "Kenapa sekolah tinggi-tinggi yang pada akhirnya saya menjadi nelayan juga. Selain itu, apabila akan meneruskan sekolah menempuh perjalanan jauh dan untuk biayanya tidak ada, maka sekolah saya sampai SMP saja. Kasihan orang tua yang harus membiayainya, selanjutnya saya membantu mereka dengan menjadi nelayan. "

Variasi penghasilan nelayan dapat disimak pada tabel berikut.

Tabel 2
Penghasilan Nelayan

No	Pendapatan/Rp	F	Persentase
1	500.000 – 800.000	16	53,34
2	900.000 – 1.200.000	4	13,34
3	1.300.000 – 1.700.000	6	20
4	1.800.000 – 2.100.000	1	3,33
5	2.200.000 - 2.6000.000	1	3,33
6	2.700.000 keatas	2	6,66
Jumlah		30	100

Sumber: Data primer, 2015

Hasil rekapitulasi penghasilan nelayan menunjukkan bahwa penghasilan yang diperoleh setiap bulan mayoritas nelayan antara Rp 500.000 hingga Rp 800.000 (53,34%). Sedangkan informan lain mampu mendapatkan lebih dari Rp 800.000/bulan, tetapi tidak banyak. Tambahan penghasilan tersebut diperoleh dari membantu pekerjaan lainnya di luar kenelayan, misalnya menjadi

ojek ataupun berjualan sembako. Penghasilan perbulan mayoritas nelayan tersebut sangat jauh dari UMK Kabupaten Banjar (tahun 2016) sebesar Rp 2.085.050. Keterbatasan penghasilan tersebut merupakan salah satu ciri nelayan tradisional yang harus menanggung mayoritas anggota keluarga sejumlah empat-lima jiwa (46,67%). Kondisi ini sebenarnya cukup berat karena dengan penghasilan yang terbatas harus menghidupi keluarga relatif banyak. Penghasilan yang didapat sering kali tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan keseharian ataupun keperluan mendadak, sehingga untuk menutupinya meminjam uang kepada saudara atau *juragan kapal* (bos) dan pengembaliannya apabila telah selesai melaut. Dari sebanyak 23 orang (76,67%) nelayan menyatakan tidak bisa menabung dan hanya 7 orang (23,33%) menjawab bisa menabung walaupun sekedarnya.

Keberadaan kelembagaan nelayan setempat seperti koperasi belum ada, sedangkan kelompok lain yang mewadahi aspirasi dan kegiatan nelayanpun juga belum ada. Pada hakikatnya sebenarnya keberadaan kelembagaan tersebut dapat membantu nelayan dalam mengatasi permasalahannya. Sementara koperasi sebagai unit usaha simpan pinjam relatif dibutuhkan untuk membantu kesulitan keuangan/ekonomi keluarga. Sehingga satu-satunya jalan keluar untuk memecahkan permasalahan tersebut meminjam pada tetangga ataupun saudara. Menurut penuturan salah seorang nelayan yang menjadi informan (Hs) menuturkan: "Sering saya mengalami kesulitan dalam keuangan, misalnya pada saat ada keperluan mendadak ataupun menyumbang hajatan tetangga atau saudara. Pada saat tidak mempunyai uang, saya pinjam pada bos biasanya sebesar Rp100.000 s/d Rp 200.000,- dan dikembalikan saat selesai melaut. Pengembaliannya langsung sejumlah yang dipinjam, tidak dicicil. Biasanya bos mau meminjami, tetapi ada juga bos lain yang tidak mau meminjami."

Kondisi ini menggambarkan bahwa ada perhatian *juragan kapal* (bos) terhadap pegawainya. Bentuk perhatian pada umumnya

juga diwujudkan pada saat menjelang lebaran dengan memberi bingkisan. Kenyataan di lapangan menunjukkan tidak semua juragan kapal menunjukkan perhatian demikian, sebagian dari mereka tidak memberi bingkisan apapun. Jadi hubungan antara juragan dengan pegawai tidak lebih sebatas hubungan kerja.

Berbagai keterbatasan yang melekat pada nelayan tradisional tersebut sebagai penyebab kemiskinan nelayan. Sebagaimana disebutkan tentang beberapa faktor penyebab kemiskinan nelayan, yang tidak hanya berkaitan dengan fluktuasi musim-musim ikan, keterbatasan sumber daya manusia, modal serta akses, jaringan perdagangan ikan yang eksploitatif terhadap nelayan sebagai produsen, tetapi juga disebabkan oleh dampak negatif modernisasi perikanan yang mendorong terjadinya pengurusan sumber daya laut secara berlebihan. Proses demikian masih terus berlangsung dan dampak lebih lanjut yang sangat dirasakan oleh nelayan adalah semakin menurunnya tingkat pendidikan mereka dan sulitnya memperoleh hasil tangkapan. Hasil studi-studi tentang tingkat kesejahteraan hidup di kalangan masyarakat nelayan telah menunjukkan bahwa kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi atau ketimpangan pendapatan merupakan persoalan krusial yang dihadapi nelayan dan tidak mudah untuk diatasi (Kusnadi, 2002).

Senada dengan itu, Bagong Suyanto (1996) menegaskan bahwa kemiskinan nelayan tradisional diklasifikasi dalam kemiskinan struktural, artinya kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial yang ada pada mereka, sehingga tidak dapat memanfaatkan sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan tersebut dapat digambarkan sebagai pertama, rendahnya akses pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kedua, lemahnya akses pelayanan dalam memperoleh permodalan sesuai kebutuhan. Ketiga, tidak mempunyai kekuatan dalam menentukan harga. Keempat, terbatasnya penguasaan alat produksi. Kelima, terbatasnya wilayah penangkapan karena alat produksi terbatas.

Berkait dengan pendapatan dan waktu kerja nelayan yang tidak menentu karena

dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Untuk menutupi kekurangan tersebut nelayan mencari tambahan penghasilan di luar sektor kenelayanan. Dari wawancara diketahui bahwa beberapa nelayan memanfaatkan waktu menjadi buruh ataupun tukang bangunan. Seperti yang disampaikan salah seorang nelayan (Kj) menyatakan: "Menjadi buruh merupakan pekerjaan yang saya pilih selain melaut. Kegiatan tersebut saya lakukan pada saat tidak melaut karena tuntutan ekonomi, harus menghidupi keluarga padahal saat-saat tertentu karena pengaruh iklim menjadikannya tidak bisa melaut, maka menjadi buruh harus saya lakukan karena tidak ada pilihan lain yang penting mendapat penghasilan."

Hal ini menyiratkan bahwa ada usaha dari nelayan mencari alternatif pekerjaan lain diluar kenelayanan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Walaupun hasil yang diperoleh relatif tidak banyak, tetapi setidaknya ada upaya untuk tetap memenuhi kebutuhan hidup selagi tidak melaut dan tidak tergantung pada juragan. Upaya ini perlu ditindaklanjuti dan dimungkinkan ada kegiatan lain selain sebagai buruh atau tukang bangunan. Oleh karena itu, diperlukan kepekaan dari aparat atau institusi terkait yang memberikan wacana berujud usaha ekonomi lain sebagai alternatif untuk menambah penghasilan selain melaut. Berdasar pengamatan dilokasi memperlihatkan, bahwa masyarakat Aluh-aluh masih jarang yang menjual bensin dan solar, karena hal tersebut sebagai salah satu bahan yang diperlukan kapal. Selain itu, dimungkinkan juga ada usaha memperbaiki jala/ jaring penangkap ikan ataupun bengkel kapal. Semua upaya ini tidak lepas dari kegiatan kenelayanan.

Ilustrasi ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya pemberdayaan sebagai upaya menambah penghasilan lain di luar kenelayanan agar kehidupan sosial ekonomi lebih baik. Sementara apabila mengandalkan penghasilan semata-mata sebagai nelayan tradisional, maka kondisi ketergantungan dan kemiskinan cenderung tetap melekat. Hal ini didasari, bahwa persoalan ketergantungan masyarakat nelayan dengan juragan ataupun tengkulak menjadi persoalan urgen yang sampai saat ini dihadapi oleh masyarakat nelayan. Ketergantungan

tersebut yang mengakibatkan masyarakat nelayan selalu kalah dalam memperoleh akses produksi, akses distribusi, dan akses pemasaran, sehingga menjadi logis ketika skala produksi nelayan kecil dan produktivitasnya rendah (Hempri Suyatno, 2004).

Strategi Penanganan Kemiskinan Nelayan Tradisional. Sampai saat ini, sebenarnya pemerintah telah mengucurkan program untuk mengatasi kemiskinan nelayan, seperti program paket bantuan seperti Kredit Investasi kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dan kredit Bimas seperti yang telah disebutkan di atas. Pada kenyataannya banyak program yang gagal dalam memberdayakan nelayan yang umumnya disebabkan kurangnya pendampingan. Kegagalan tersebut juga disinyalir karena bantuan bersifat karitatif (*charity*), Demikian juga kebijakan yang dikenal sebagai *blue revolution* yaitu tentang motorisasi perahu dan modernisasi alat tangkap yang menyebabkan meningkatnya produksi perikanan tetapi menyebabkan kalah bersaing dengan nelayan bermodal, serta meningkatnya kerusakan lingkungan karena eksploitasi sumber daya laut yang tidak beraturan. Berdasarkan pemikiran bahwa masalah kemiskinan selalu diartikan sebagai suatu kondisi ekonomi semata-mata. Runutan wawancara dari salah seorang pendamping dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat (Im) menyatakan "Nelayan di Aluh-aluh pernah mendapat program bantuan peralatan dari pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan setempat sekitar tahun 2012 berupa kapal penangkap ikan yang relatif lebih besar dengan harapan jarak jelajah akan lebih namun kapal tersebut tidak difungsikan karena tidak sesuai dengan kondisi lokasi nelayan setempat. Jarak jelajah mereka biasanya tidak jauh. Sehingga bantuan tersebut malahan tidak berguna. Oleh karena itu, apabila pemerintah akan memberikan bantuan terlebih dahulu perlu dilaksanakan penjajagan agar bantuan dapat digunakan sebagaimana layaknya dan tidak salah sasaran. Sehingga sampai saat ini nelayan setempat belum pernah mendapat bantuan lagi."

Hal ini membuktikan bahwa pengentasan kemiskinan nelayan seharusnya tidak sekedar memberikan bantuan semata-mata yang bersifat *charity* tetapi lebih ditekankan pada upaya *empowering* atau pemberdayaan. Memberdayakan nelayan hendaknya memahami kondisi kultural setempat karena setiap daerah pesisir mempunyai karakteristik berbeda. Senada dengan hal tersebut menurut Hempri Suyatno juga (2004) ada beberapa hal yang diperhatikan dalam memberdayakan masyarakat nelayan. Pertama, pemberdayaan harus dapat merubah sikap mental masyarakat nelayan. Pada umumnya ada anggapan bahwa pola menangkap ikan berdasar kebiasaan yaitu berangkat pagi dan pulang menjelang siang. Demikian juga kondisi nelayan di Aluh-aluh mempunyai kebiasaan jam kerja apabila melaut sore pulang pagi (jam 16.00- 10.00).

Merubah sikap mental yang perlu dibenahi adalah, pertama perubahan nilai budaya yang dapat dilakukan dengan cara mengkonsolidasikan nilai positif seperti perencanaan hidup, optimisme, perubahan kebiasaan hidup ataupun peningkatan produktivitas kerja. Adapun persoalan yang menjerat dan menyebabkan nelayan tidak mampu keluar dari jerat kemiskinan adalah pola perilaku konsumtif dengan membelanjakan uang untuk hal yang tidak perlu. Kebiasaan tersebut mereka lakukan sebagai wujud pelampiasan sehabis melaut. Kondisi ini bertolak belakang apabila nelayan mempunyai pendidikan cukup tentunya mampu memanfaatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar penting bagi mereka. Persoalan ini sebenarnya berkaitan dengan belum dimilikinya kapasitas profesional nelayan.

Kedua adalah kegiatan pemberdayaan dengan memasukkan modal sosial yang diharapkan menjadi basis kegiatan kolektif. Kondisi ini harus dipadukan secara simultan dengan program pengentasan kemiskinan nelayan. Selama ini seringkali program pembangunan gagal disebabkan para pengambil kebijakan mengabaikan modal sosial. Adapun elemen pokok modal sosial adalah kuatnya sifat dan sikap saling percaya dan bisa dipercaya

dalam bentuk relasi dari hubungan vertikal dan horisontal, sehingga dapat dikembangkan sikap saling percaya antara nelayan, juragan, tengkulak, dan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat nelayan.

Dalam rangka melaksanakan pemberdayaan nelayan tersebut, berberapa yang harus diperhatikan adalah pemberdayaan harus mampu memunculkan inisiatif dan kepercayaan (*trust*) masyarakat nelayan. Artinya masyarakat nelayan harus muncul kepercayaannya terhadap program yang dijalankan oleh pihak luar dan dimanusiakan martabatnya supaya mau mengikuti program tersebut tanpa paksaan. Selanjutnya merevitalisasi modal sosial nelayan, seperti kelompok nelayan, koperasi nelayan tempat pelelangan ikan ataupun sistem pemasarannya. Semua itu dikemas dalam fungsi kelembagaan lokal nelayan yang mengakomodasi kepentingan nelayan.

D. SIMPULAN

Berdasar hasil penelitian disimpulkan, bahwa kemiskinan pada nelayan tradisional khususnya nelayan di Kecamatan Aluh-aluh ditandai dengan keterbatasan. Keterbatasan dimaksud seperti peralatan tangkap dan jarak jelajah terbatas, pendidikan rendah, penghasilan terbatas, dan belum adanya kelembagaan lokal seperti koperasi. Berbagai keterbatasan yang disandang nelayan menyebabkannya kesejahteraan keluarga relatif rendah. Oleh karena itu, untuk mengatasi keterbatasan tersebut dilaksanakan strategi penanganan yaitu menggunakan pendekatan budaya. Hal ini mengandung pengertian bahwa untuk menangani masalah masyarakat nelayan dilaksanakan secara komprehensif, holistik dengan memperhatikan sistem nilai, potensi lokal, dan daya dukung lingkungan.

Atas dasar simpulan tersebut, maka rekomendasi yang diajukan untuk meningkatkan harkat dan martabat nelayan tradisional dimasa reformasi ini sebenarnya dengan perluasan alternatif pilihan mata pencaharian yang dilakukan nelayan tradisional sendiri, baik dibidang perikanan maupun non perikanan. Selanjutnya juga dapat dilaksanakan dengan menggandeng

masyarakat yang peduli dan bekerjasama dengan pemerintah selaku pemangku kebijakan untuk mengembangkan seluruh potensi dan strategi dalam rangka pengelolaan sumber daya alam di lingkungannya dengan tetap memegang budaya setempat. Selanjutnya ditetapkan regulasi dan hukum peraturan yang lebih berpihak kepada nelayan tradisional/kecil. Melalui hal ini diharapkan kemakmuran dan kesejahteraan nelayan secara bertahap dapat teralisasi. Sementara itu alangkah lebih baiknya didirikan kelembagaan keuangan mikro nelayan yang belum ada ditempat tersebut melalui kerja sama antara KKP dengan instansi terkait.

Diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian, hingga tersusun naskah ini.

PUSTAKA ACUAN

- Acheson, James M, 1981. *Anthropology of Fishing. Annual Review Anthropology Inc.* Vol. 10.p.275-316.
- Bagong Suyanto, 1996. *Perangkap kemiskinan: Problem dan Strategi Pengentasannya.* Surabaya: Airlangga University Press.
- Badan Pusat Statistik, tahun 2013.
- DPK, 2013, *Produksi perikanan tangkap kabupaten Banjar tahun 2012.* Martapura: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banjar.
- Fatik Wijaya, *Mengurangi Benang Kusut Kemiskinan Nelayan*, Kedaulatan Rakyat 27 Desember 2003.
- Hempri Suyatno, 2004, *Pendekatan Kultural Dalam Pemberdayaan Nelayan (Sebuah Reorientasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan), Strategi Pemberdayaan Masyarakat.* Yogyakarta: Aditya Media.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusnadi, 2002. *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*, Yogyakarta: LKiS.
- , 2008. *Akar Kemiskinan Nelayan*, Yogyakarta: LKiS.
- , 2009, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*, Yogyakarta: Ar-RUZZ Media.

- Kabupaten Banjar Dalam Angka, 2014.
- Miles, M.B and A.M. Huberman, 1984. *Data Management and Analysis Method* dalam Denzin and Lincoln (edited). *Hand Book of Qualitative Research.* London: Sage Publications.
- Mubyarto, 1984, *Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropologi di dua Desa Pantai*, Jakarta: CV Rajawali.
- Monografi Kecamatan Aluh-Aluh, 2014.